

ABSTRAK

Pembatalan Pasangan Calon Kepala Daerah Sebelum Hari Pemungutan Suara

**Oleh:
Dedy Triyadi**

Penelitian ini bertujuan menganalisis pembatalan pasangan calon Wahdi Siradjudin dan Qomaru Zaman sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Metro sebagai pasangan pada Pilkada Kota Metro Tahun 2024 yang menimbulkan ketidakpastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dalam penanganan calon kepala daerah yang berstatus terpidana. Menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual dan studi kasus dapat disimpulkan bahwa pemberhentian calon pasangan kepala daerah yang telah ditetapkan kurang dari 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan bertentangan dengan peraturan pemilihan. Sehingga dengan demikian pembatalan pasangan calon walikota dan wakil walikota Metro 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi, juga menunjukkan terdapat kekosongan hukum yang berimplikasi ketidakpastian hukum. Diperlukan konstruksi regulasi untuk mengatur mekanisme pembatalan pasangan calon kepala daerah dengan status terpidana, sehingga ada kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan Pilkada pada masa mendatang, pengusulan penggantian calon hanya dapat dilakukan maksimal 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara, sementara yang terjadi pada Pilkada di Kota Metro terhitung 7 (tujuh) hari menjelang hari pemungutan suara. Tidak adanya regulasi rinci yang mengatur prosedur tata cara dan mekanisme pembatalan pasangan calon yang terkena kasus hukum setelah ditetapkan sebagai pasangan calon 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara.

Kata Kunci: Konstruksi, Regulasi, Pembatalan Pasangan Calon, Pemilihan Kepala Daerah, Terpidana.

ABSTRACT

Disqualification of Regional Head Candidate Pairs Before Election Day

By
Dedy Triyadi

This study aims to analyze the disqualification of Wahdi Siradjuddin and Qomaru Zaman as candidates for Mayor and Deputy Mayor of Metro in the 2024 Regional Election, which resulted in legal uncertainty (rechtsonzekerheid) concerning candidates with criminal convictions. Using a statutory, conceptual, and case study approach, the findings indicate that disqualifying a candidate pair less than 30 days before the election violates electoral regulations. The cancellation of the Metro candidate pair only seven days before the election not only contradicts higher-level legislation but also reveals a legal gap that leads to legal uncertainty. Therefore, regulatory reform is necessary to establish clear mechanisms for disqualifying candidates with criminal status to ensure legal certainty and fairness in future regional elections. Candidate replacements should only be allowed up to 30 days before the election. In the Metro case, the disqualification occurred just 7 (seven) days before the vote, with no specific regulations outlining the procedures and mechanisms for such actions after candidates have been officially registered. This lack of regulation undermines the consistency and reliability of the electoral process.

Keywords: Construction, Regulation, Disqualification of Candidate Pairs, Regional Head Elections, Convicted Individuals.